Pelatihan Kompetensi Standar Pelayanan Minimal Desa Bagi Aparatur Desa Mojorejo Berbasis Aplikasi Pintar Web

Gading Gamaputra[1], Sarmini[2], Anna Noordia[3], Bonda Sisephaputra[4], Saifudin Yahya[5], Nur Azizah Afianti[6]

[1, 2, 3, 4, 5)] PSDKU Kampus 5, Universitas Negeri Surabaya
[6)] Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya
e-mail: gadinggamaputra@unesa.ac.id

Abstrak

Desa Mojorejo, Kabupaten Magetan merupakan salah satu desa di Indonesia yang mengalami tantangan penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi. Saat ini Desa memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya yang dapat ditinjau melalui sistem informasi desa dan kelurahan yang tidak aktif sejak tahun 2020 dan berdampak pada efisiensi pelayanan publik. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk memberikan panduan, pengetahuan, serta meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam penggunaan sistem berbasis website guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Metode kegiatan dirancang secara partisipatif dan aplikatif. Pendekatan dilakukan melalui tahap observasi awal dan pelatihan praktis. Tahap kegiatan meliputi identifikasi dan pemetaaan masalah sebagai sarana diskusi awal dengan mitra, analisis kompetensi standar pelayanan melalui perancangan ulang sistem, serta pelatihan kompetensi standar pelayanan dengan metode workshop. Hasil program menunjukkan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang terlihat dari pembaruan sistem informasi desa dan kelurahan dengan tampilan baru pada website serta ketepaduan informasi terkini yang mempermudah akses masyarakat. Temuan ini penting sebagai model rujukan bagi desa lain untuk memanfaatkan potensi dalam membangun digitalisasi desa menuju *Smart Village*. Saran kegiatan ini adalah penambahan dan pemeliharaan infrastruktur berkala, kerjasama stakeholder pada bidang teknologi melalui pelatihan dan pendampingan, serta pengembangan website desa dengan mekanisme pengadaan jasa.

Kata kunci: Pelatihan Kompetensi, Standar Pelayanan Minimal Desa, Inovasi Digital Desa, Smart Village

Abstract

Mojorejo Village, Magetan Regency, is one of the villages in Indonesia that faces challenges in providing technology-based public services. Currently, the village has limited resources in terms of quantity and quality, which can be seen through the village and sub-district information system that has been inactive since 2020, impacting the efficiency of public services. The Community Service Activity aims to provide guidance, knowledge, and improve the understanding and skills of village officials in using a website-based system to achieve effective and efficient public services. The activity methods are designed to be participatory and applicable. The approach is carried out through initial observation and practical training. The stages of the activity include identifying and mapping problems as a means of initial discussion with partners, analyzing service competency standards through system redesign, and training service competency standards using the workshop method. The results of the program show an increase in the capacity of officials, as seen from the renewal of the village and sub-district information system with a new look on the website and the integration of the latest information, which facilitates public access. These findings are important as a reference model for other villages to utilize their potential in developing village digitalization towards Smart Villages. Recommendations for this activity include the addition and periodic maintenance of infrastructure, stakeholder cooperation in the field of technology through training and mentoring, and the development of village websites with service procurement mechanisms.

Keywords: *Competency Training, Minimum Service Standards for Villages, Digital Village Innovation, Smart Village*

PENDAHULUAN

Sebagai entitas administratif yang paling dekat dengan masyarakat, desa diharapkan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas (Noviyanti et al., 2025). Dalam kerangka otonomi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola sumber daya dan memberikan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat dengan tetap berlandaskan pada prinsip demokrasi, keadilan, dan pemerataan (Zakiyah & Sunarya, 2024). Penerapan desentralisasi pada daerah merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam mempercepat upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat (Handraini et al., 2024). Langkah ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Pentingnya pembangunan desa tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kondisi internal masyarakat desa, tetapi juga menjadi pilar utama dalam menciptakan keseimbangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Wang & Ma, 2023). Oleh karena itu, penguatan tata kelola pemerintah desa yang didukung oleh kebijakan, pelatihan, dan program yang berkelanjutan menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional yang inklusif. Sebagai ujung tombak pelayanan publik, pemerintah desa memikul tanggungjawab utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan yang mencakup aspek administratif dan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi (Safitri et al., 2022). Untuk memastikan kualitas layanan yang optimal tingkat desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa yang telah ditetapkan sebagai acuan wajib yang dirancang guna menjamin kualitas kompetensi manajerial desa dilaksanakan sesuai standar tertentu yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa mencakup berbagai aspek untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa, yakni pelayanan administrasi pemerintahan seperti pembuatan akta kelahiran, akta kematian, dan administrasi lainnya, selain itu aspek kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat terkait ekonomi dan sosial, serta aspek infrastruktur dan fasilitas umum (Guntur et al., 2023). Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang diatur dalam SPM di antaranya terkait dengan keterjangkauan, kualitas, waktu pelayanan dan ketersediaan sumber daya (Gufran et al., 2021). Kompetensi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa aparatur desa memegang peranan dalam keberhasilan implementasi SPM. Kompetensi ini mencakup keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan oleh pemerintah desa untuk mengelola sumber daya, merencakan program, serta memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan dapat memenuhi standar yang ditetapkan (Safaruddin et al., 2022).

Namun, dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru bagi desa. Desa kini tidak hanya harus beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi di tingkat lokal, tetapi juga perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Dalam hal ini teknologi berperan sebagai alat yang digunakan untuk membantu proses pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, hingga penyebaran informasi yang relevan (Roifah & Yuana, 2025). Digitalisasi desa, misalnya menjadi salah satu solusi potensial untuk mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat (Mohamad et al., 2024). Kemajuan teknologi informasi memberikan peluang baru dalam pengelolaan pelayanan publik. Penggunaan platform berbasis web memungkinkan proses administrasi dan pelayanan berjalan lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat (Tambunan & Dompak, 2025). Desa Mojorejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki potensi besar dalam pengembangan teknologi. Namun saat ini desa menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik ebrbasis teknologi, terutama dalam hal keterbatasan kuantitas serta kualitas sumber daya yang berdampak pada pemanfaatan sistem informasi desa dan kelurahan yang belum optimal. Dalam hal ini, Desa Mojorejo menghadapi kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan yang terstruktur, khususnya terkait standar pelayanan minimal berbasis teknologi, yang tidak hanya mendukung kualitas pelayanan tetapi juga memperkuat posisi Desa Mojorejo sebagai pelopor inovasi di tingkat desa.

Pelatihan dan pengembangan kompetensi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa bagi aparatur desa menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa standar pelayanan minimal dapat tercapai (Riewpassa et al., 2025). Pemerintah desa perlu diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengelola pelayanan minimal dapat tercapat. Selain itu

Pemerintah desa perlu diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengelola pelayanan yang tidak hanya efisien tetapi juga berkualitas. Dalam hal ini pengelolaan pelayanan yang berkualitas tidak hanya terbatas pada kewajiban administratif, melainkan melalui pelatihan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bagi aparatur desa bahwa program pelayanan publik merupakan bentuk nyata kehadiran negara pada tingkat lokal, yakni desa (Nurhakim et al., 2025)

Dalam upaya meningkatan kualitas pelayanan berdasarkan kompetensi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa Mojorejo, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh aparatur desa terkait dengan implementasi Standar Pelayanan Minimal dan pengelolaan administrasi pemerintah desa. Kondisi menunjukkan para aparatur belum sepenuhnya memahami standar pelayanan minimal yang harus diterapkan sehingga pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan sumber daya dan penyusunan program yang tepat. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik di Desa Mojorejo masih terbatas, meskipun kemajuan teknologi telah memberikan berbagai kemudahan, pengelolaan pelayanan berbasis teknologi masih belum sepenuhnya diterapkan. Kondisi ini dapat ditinjau melalui sistem desa dan kelurahan yang tidak terdapat pembaharuan informasi sejak tahun 2020. Hal tersebut mengakibatkan tidak tersampaikannya informasi desa seperti pelayanan publik, program kerja, maupun transparansi keuangan secara optimal kepada masyarakat sehingga menurunkan tingkat efektivitas pelayanan publik di Desa Mojorejo. Kurangnya kompetensi aparatur desa dalam menggunakan teknologi menyebabkan kesulitan dalam memanfaatkan potensi digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Maka diperlukan sebuah Pelatihan Kompetensi Standar Pelayanan Minimal Desa yang bertujuan untuk memberikan panduan, pengetahuan, serta meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan kompetensi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa dengan komposisi 70:30, yang mana 70% berupa pengenalan teori dan ketentuan perundang-undangan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa, sedangkan 30% berupa evaluasi. Jenis kegiatan yang digunakan selama pengabdian meliputi perancangan kegiatan, identifikasi informasi jabatan, identifikasi masalah SPM, analisis kompetensi SPM, dan evaluasi. Sementara itu untuk metode pelaksanaan pengabdian terdapat beberapa kegiatan yaitu (1) Identifikasi dan Pemetaan Masalah, (2) Analisis Kompetensi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa, (3) Pelatihan Kompetensi Standar Pelayanan Minimal Desa dan Peresmian Website Desa. Mitra pada kegiatan ini adalah Pemerintah Desa Mojorejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Partisipan kegiatan meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Kantor Desa, Aparatur Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mojorejo. Kegiatan dilaksanakan berkelanjutan sejak Senin 23 Juni 2025 sampai dengan Senin, 4 Agustus 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi dan Pemetaan Masalah

Identifikasi dan pemetaan masalah dilakukan melalui diskusi bersama perangkat desa dan pihak terkait. Kegiatan dilaksanakan pada Senin, 23 Juni 2025 yang bertempat di Kantor Desa Mojorejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali informasi awal dari berbagai perspektif. Dalam diskusi ini, tim pengabdian dan perangkat desa melakukan pemetaan permasalahan pada aspek kelembagaan, pelayanan, teknologi informasi, maupun kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil diskusi dan observasi awal menunjukkan dalam rangka percepatan teknologi informasi, Desa Mojorejo mengalami kendala dalam pengelolaan website Desa. Dalam hal ini Aparatur Pemerintah Desa Mojorejo mengalami kendala berupa lupa password untuk mengakses akun website desa. Hal tersebut menyebabkan website desa tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai media transparansi dan akuntabilitas oleh Pemerintah Desa Mojorejo. Informasi dalam website desa tidak mengalami pembaruan, sehingga informasi yang tersedia menjadi tidak relevan dan tidak dapat diakses oleh masyarakat. Tampilan website Desa tidak mengalami pembaruan dalam jangka waktu yang cukup lama

semenjak 9 Januari 2020 dan fitur lain yang tidak berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemeliharaan website desa belum berjalan secara optimal dan sistematis. Untuk mengatasi permasalahan, tim pengabdian mengambil langkah antisipatif dengan mendampingi pihak Pemerintah Desa Mojorejo untuk memulihkan akses pada website yang ditujukan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan. Tim mendampingi untuk mengajukan surat permohonan, serta komunikasi dan koordinasi pihak terkait. Setelah pengajuan, instansi telah memberikan balasan dengan memberikan *reset* akun yaitu *username* dan *password* baru.

Analisis Kompetensi Standar Pelayanan Minimal Desa

Kegiatan ini merupakan diskusi lanjutan berkaitan penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan, penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan, pemberian surat keterangan penyederhanaan pelayanan, dan pengaduan masyarakat. Selama sesi diskusi berlangsung, pihak Pemerintah Desa Mojorejo menyampaikan salah satu kendala dalam penyediaan dan penyebaran informasi desa yakni belum adanya publikasi secara online dan hingga saat ini masih memanfaatkan publikasi melalui media banner. Informasi pada banner hanya dapat diakses oleh masyarakat tertentu yang melintasi lingkungan sekitar dan tidak dapat dijangkau oleh warga desa secara luas dan merata. Hal ini menunjukkan rendahnya keterbukaan informasi publik serta terbatasnya peluang kolaborasi pembangunan desa yang berbasis data aktual.

Selama sesi diskusi berlangsung, Pemerintah Desa menyampaikan bahwa desa ingin mulai melakukan publikasi setiap informasi tidak hanya melalui media banner, namun publikasi secara digital dengan memanfaatkan website. Berdasarkan hasil koordinasi, tim pengabdian menyatakan kesediaan untuk membantu merancang publikasi informasi desa dalam bentuk website yang telah terintegrasi. Sistem ini akan dirancang sesuai dengan kebutuhan informasi desa dan dapat dioperasikan secara efektif dan efisien oleh desa. Saat sistem dalam tahap perancangan, tim menyampaikan panduan penggunaan sistem informasi desa dan kawasan (sideksel) untuk dipelajari secara mandiri guna memberikan pemahaman mendasar tentang sistem operasi website desa.

Pelatihan Kompetensi Standar Pelayanan Desa

Pelatihan kompetensi dilaksanakan melalui metode *workshop*. Partisipan dalam kegiatan ni meliputi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan, Direktur Kampus Unesa 5, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Kampus Unesa 5, Kepala Desa Mojorejo, Sekretaris Desa Mojorejo, anggota Badan Permusyawaratan Desa Mojorejo, dan Aparatur Desa Mojorejo. Dalam pelatihan ini penyampaian materi akan dialokasikan menjadi 2 (dua) sesi dengan sub pembahasan inovasi standar pelayanan desa berbasis web dan workshop penggunaan web untuk peningkatan kompetensi standar pelayanan minimal desa. Materi pertama inovasi standar pelayanan menjabarkan tentang konsep desa digital dan *smart village*, manfaat digitalisasi *governance* desa, fitur teknologi web desa, faktor pendukung keberhasilan, serta peran desa pintar dan inovasi digital. Sementara itu untuk sesi kedua, para partisipan akan didampingi langsung oleh pemateri untuk melakukan praktik terkait penggunaan sideksel.

Sesi kedua dimulai dengan perkenalan umum tentang sideksel terkait cara mengakses website. Selanjutnya pemateri menjelaskan fitur yang tersedia dan tata cara penggunaan fitur sistem. Fitur pertama berkaitan dengan menu login dan profil desa. Untuk mengakses website tersebut, aparatur desa harus memiliki *username* dan *password* yang telah diverifikasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan. Setelah berhasil login pada sistem, setiap user dapat mengakses berbagai fitur baik untuk melihat maupun melakukan edit data, seperti menu profil desa, transparansi, produk hukum, info desa, sarana prasarana dan kegiatan kemasyarakatan. Selain memberikan pendampingan pada partisipan, Tim turut memperkenalkan tampilan website terbaru Desa Mojorejo yang telah dirancang ulang. Dengan keberadaan sistem berbasis website ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi instansi yakni Pemerintah Desa Mojorejo untuk memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Selama kegiatan berlangsung, para partisipan memberikan kesan positif dan berperan aktif dalam mengajukan pertanyaan, saran, maupun ide untuk penerapan sistem yang berkelanjutan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dalam menghadapi tantangan pelayanan publik di era digital, sekaligus mendukung visi pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan di Kabupaten Magetan. Berikut dokumentasi kegiatan.



Gambar 1. Dokumentasi Pelatihan Kompetensi Standar Pelayanan Minimal Desa

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Pelatihan Kompetensi Standar Pelayanan Minimal Desa Bagi Aparatur Desa Mojorejo Berbasis Web ini telah dilaksanakan secara sistematis dan memberikan dampak positif bagi aparatur desa maupun masyarakat lingkup Desa Mojorejo. Dalam mekanisme pengabdian terdapat beberapa tahap kegiatan, tahap pertama yakni identifikasi dan pemetaan masalah. Kegiatan ini menjadi sarana diskusi awal bagi tim pengabdian serta mitra untuk pemetaan masalah yang dihadapi oleh mitra. Hasil observasi dan wawancara awal menunjukkan bahwa Desa Mojorejo mengalami keterbatasan untuk mengakses website desa yang berperan sebagai media komunikasi dan transparansi kepada masyarakat dikarenakan kurangnya kompetensi sumberdaya dan kendala akses login. Berdasarkan hal tersebut, tim pengabdian melakukan pendampingan untuk memulihkan akses website melalui proses pengajuan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan untuk mendapatkan akses baru bagi admin desa.

Tahap kedua yakni berkaitan dengan analisis kompetensi standar pelayanan minimal desa. Kegiatan ini merupakan diskusi lanjutan untuk memetakan permasalahan standar pelayanan miinimal yang didasarkan pada penyediaan informasi layanan, penyediaan infografis, kependudukan, dan pertanahan. Dalam hal ini Pemerintah Desa terkendala untuk merancang publikasi digital karena keterbatasan sumber daya dan berkeinginan untuk menyusun website yang interaktif. Tim pengabdian membantu mitra dengan merancang ulang dan mendesain beberapa fitur baru untuk website Desa Mojorejo yang didasarkan pada sideksel. Setelah proses perancangan ulang, website diresmikan pada pertemuan mendatang dengan agenda pelatihan.

Tahap ketiga yakni pelatihan kompetensi standar pelayanan minimal desa berbasis web, merupakan agenda lanjutan dalam rangkaian pengabdian masyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan dengan metode workshop yang berfokus tentang 2 (dua) sub materi yakni inovasi standar pelayanan desa berbasis web dan penggunaan web untuk peningkatan kompetensi standar pelayanan desa berbasis sideksel. Dalam kegiatan pelatihan ini para peserta tidak hanya diberikan materi tentang konsep standar pelayanan minimal, melainkan juga pendampingan untuk praktik penggunaan sideksel. Selama kegiatan berlangsung, para partisipan menunjukkan kesan positif yang ditunjukkan melalui keterlibatan aktif dalam bertanya, memberikan saran masukan, dan ide berkelanjutan untuk mewujudkan transformasi digital yang berkelanjutan.

SARAN

Pengabdian kepada masyarakat terkait peningkatan kompetensi standar pelayanan minimal desa bagi aparatur Desa Mojorejo ini masih memerlukan adanya perbaikan serta peningkatan berkelanjutan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hal tersebut meliputi pengadaan sumberdaya yang mumpuni melalui penambahan dan pemeliharaan berkala dari segi infrastruktur dan perekrutan sumberdaya aparatur yang mumpuni dalam bidang teknologi informasi. Selanjutnya dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur desa, Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan stakeholder untuk memberikan pelatihan dan pendampingan guna menunjang literasi digital, serta berkolaborasi untuk mengembangkan website desa yang disesuaikan dengan perkembangan era digital agar sistem dapat beradaptasi dan memenuhi kebutuhan layanan publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Surabaya atas dukungan yang telah diberikan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Gufran, Syamsuddin, Kasmar, & Rahmat Akbar. (2021). Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Di Desa Dorokobo Kabupaten Dompu Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(5), 733–740. https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i5.369

Guntur, M., Arka, M. H., & Sulmiah, S. (2023). Implementation of Village Minimum Service Standards in Ganra Village, Ganra District, Soppeng District. *Jurnal Aktor*, *3*(1), 39. https://doi.org/10.26858/aktor.v3i1.54705

Handraini, H., Frinald, A., & Magriasti, L. (2024). Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia. *Jurnal Professional*, *11*(2), 601–608.

Mohamad, Y., Bonok, Z., & Adussamad, S. (2024). Transformasi Digital: Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa Tabumela Melalui Sistem Berbasis Web Digital Transformation: Tabumela Village Government Administration Management Through a Web-Based System. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Eldimas*, *2*(2), 52–62. https://doi.org/10.33756/EJPPM

Noviyanti, E., Nawawi, R., Indonesia, U. Y., Perintis, J., No, K., Tangerang, K., & Banten, P. (2025). *Analisis Peran Pelayanan Pemerintahan Desa terhadap Perkembangan Desa Mekarwangi Kecamatan Cisauk menyelenggarakan pelayanan publik serta mewujudkan pembangunan di tingkat lokal . Dalam Mekarwangi dan sejauh mana pelayanan tersebut berkontribusi terhadap* .

Nurhakim, R. F., Kamil, R. R., Arrafi, M. R., Saefulrahman, I., & Rudiana, R. (2025). Kualitas Pelayanan Publik di Desa: Studi Kasus di Kantor Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, *6*(2), 18. https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.273

Riewpassa, A., Latuheru, B. P., & Touwely, G. H. (2025). Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Desa: Upaya Mewujudkan Pelayanan Prima. *KAMBOTI: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *5*(2), 72–82. https://doi.org/10.51135/kambotivol5issue2page72-82

Roifah, T. N., & Yuana, A. G. (2025). Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan

Kesejahteraan Bagi Masyarakat Miskin Melalui UMKM.pdf. *Jurnal Medika: Medika*, *4*(3), 646–654.

Safaruddin, S., Riskasari, R., & Masyitah, M. (2022). Improving the Quality of Public Services: Study of Implementation of Minimum Service Standards (SPM). *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, *11*(2), 158. https://doi.org/10.31314/pjia.11.2.158-165.2022

Safitri, S. D., Cikusin, Y., & Hayat, H. (2022). Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, *3*(5), 784–792. https://doi.org/10.36418/jiss.v3i5.582

Tambunan, M., & Dompak, T. (2025). Peran E-Government Dalam Peningkatan Efesiensi Dan Efektivitas Pelayananan Publik. *Jurnal Professional*, *12*(1), 281–288.

Wang, H., & Ma, D. (2023). Research on Urban and Rural Integrated Development Strategies in Villages and Towns. *Frontiers in Business, Economics and Management*, *10*(2), 81–85. https://doi.org/10.54097/fbem.v10i2.10687

Zakiyah, N., & Sunarya, A. (2024). The Role of Village Government in Providing Public Services to the Community in Galangpengampon Village, Wonopringgo District, Pekalongan Regency. *Ilomata International Journal of Social Science*, *5*(2), 397–409. https://doi.org/10.61194/ijss.v5i2.1134